



► **PEMBAYARAN NONTUNAI**

## Transaksi QRIS Tembus Rp1,77 Triliun

JOGJA—Industri pembayaran kini secara *end to end* telah melayani digitalisasi ekonomi antara seluruh pihak, baik di daerah maupun secara nasional.

Di Kota Jogja, misalnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY mencatat, total transaksi QRIS di Kota Jogja tumbuh 3,5 kali pada 2022 lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Rp396,76 miliar naik menjadi Rp1,770 triliun.

Itulah sebabnya, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, BI mendukung akselerasi transformasi digitalisasi pembayaran.

Kepala Perwakilan BI, DIY, Budiharto Setyawan, mengapresiasi diluncurkannya pembayaran kanal tunggal di Kota Jogja.

Kanal tunggal pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi transaksi.

“Harapannya, implementasi kanal ini akan mendorong peningkatan digitalisasi dan

realisasi penerimaan daerah serta mengoptimalkan layanan Pemda ke masyarakat,” kata Budi, Sabtu (25/2).

Selain itu, lanjut Budi, keberadaan keberadaan kanal tunggal tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan ekosistem digital. Dampaknya ekonomi tidak hanya tumbuh kuat, namun juga seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kanal tersebut terwujud berkat kolaborasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah [TP2DD] untuk mendigitalisasikan transaksi keuangan pemerintah dan ekosistemnya,” katanya.

Dari catatan BI, total transaksi QRIS di Kota Jogja tumbuh 3,5 kali pada 2022 lalu dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp396,76 miliar naik menjadi Rp1,77 triliun.

Adapun transaksi QRIS *people to government* (P2G) di wilayah Kota Jogja tercatat naik tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, dari Rp4,33 miliar menjadi Rp18,07

miliar.

Sementara pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih didominasi kanal *teller* sebesar 97% dan transaksi digital baru mencapai 3%.

Menurutnya, untuk mempercepat dan memperluas penggunaan pembayaran digital maka perlu kolaborasi antar-*stakeholder*.

“Dibutuhkan sinergi dan inovasi dari para *stakeholder* untuk mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah [ETPD]. Baik untuk perluasan implementasi, penguatan koordinasi dan sinergi, serta penguatan *monitoring* dan evaluasi,” katanya.

Sebelumnya, TP2DD Kota Jogja menggelar *high level meeting* untuk membahas langkah dalam mengakselerasi ETPD, Jumat (24/2).

Kegiatan tersebut merupakan *high level meeting* pertama yang digelar di DIY. Adapun ETPD merupakan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. (*Abdul Hamid Razak*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005